

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SMP

Erviana Yulianti (SMP Negeri 6 Kota Lubuklinggau)

e-mail: ervianayulianti653@yahoo.com

Aliman (Prodi MAP FKIP Unib)

Osa Juarsa (Prodi MAP FKIP Unib)

Abstract:

The Objective of this study is to describe Education financial management at Junior high School 2 lubuklinggau city. The study applied the descriptive qualitative method. The subject of this study are headmaster, treasures, teacher parents and school committee, Data Collection was use through interview, Observation, and decommentation through interview, Observation and documentation technigues. The result of study showed: (1) Finacial planning education created 1 year budget. (2) Implementation of the financing done by RAPBS and reported on a quarterly basis. (3) Monitoring and evaluation of education financing is done periodically.

Keywords: educational financial management, junior high school

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pengelolaan keuangan Pendidikan di SMP Negeri 2 kota Lubuklinggau. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, harta, guru orang tua dan komite sekolah, Pendataan itu digunakan melalui wawancara, observasi, dan dekumentasi . Hasil penelitian menunjukkan (1) pendidikan perencanaan Finacial dibuat anggaran 1 tahun. (2) Pelaksanaan pembiayaan dilakukan sesuai dengan RAPBS dan dilaporkan setiap tiga bulan. (3) Pemantauan dan evaluasi pembiayaan pendidikan dilakukan secara berkala.

Kata kunci: manajemen pembiayaan pendidikan, sekolah menengah pertama

PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab berat dalam mewujudkan cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk kepribadian bangsa yang berbudi luhur, sehingga pendidikan dapat didefinisikan sebagai faktor penting untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan juga merupakan sarana strategis guna peningkatan mutu sumber daya manusia baik dalam pembangunan suatu bangsa maupun dalam tatanan global. Sumber daya manusia menjadi modal dasar sekaligus kekayaan suatu bangsa, sedangkan sumber-sumber modal dan materi merupakan faktor-faktor produksi yang hanya dapat diaktifkan oleh sumber daya manusia.

Terdapat sejumlah faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi sekaligus merupakan potensi sumber daya pendidikan. Faktor internal berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, sumber dana, sarana dan prasarana. Sedangkan, faktor eksternal berkenaan

dengan masyarakat, kebijakan pemerintah, perekonomian, sosial-budaya, politik, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Biaya merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang bernilai strategis itu tidak akan berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, tidak ada kegiatan pendidikan tanpa biaya. Biaya itu diperlukan untuk memenuhi keberagaman kebutuhan yang berkenaan dengan kelangsungan proses pendidikan.

Dinamika pendidikan dilihat dari segi pembiayaan pendidikan berhubungan dengan: (1) jumlah pembiayaan sekolah swasta; (2) penggajian staf pengajaran; (3) pembiayaan dan penerimaan pendapatan; dan (4) kembalian dari pembiayaan pendidikan yang meningkat. Indiyanto (2001:1-2) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan masih diarahkan pada empat tema kebijakan, yaitu peningkatan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu

pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, dan peningkatan efisiensi pendidikan. Salah satu unsur yang penting dimiliki oleh suatu sekolah agar menjadi sekolah yang dapat mencetak anak didik yang baik adalah dari segi pembiayaan. Manajemen biaya pendidikan sangat penting hubungannya dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Beragam sumber yang dimiliki oleh suatu sekolah, baik dari pemerintah maupun pihak lain. Ketika dana masyarakat atau dana pihak ketiga lainnya mengalir masuk, harus dipersiapkan sistem pengelolaan pembiayaan yang profesional dan jujur. Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa tidak semua kalangan dapat memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkualitas karena mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Kondisi inilah kemudian mendorong dimasukkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pasal 80 ayat 1 yang berbunyi, "Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% dari belanja negara". Hal ini ditujukan agar masyarakat dapat menikmati pelayanan pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Sumber daya pendidikan yang dianggap penting adalah uang. Pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya biaya atau uang. Uang ini termasuk sumber daya yang langka dan terbatas. Sehingga, uang perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar membantu pencapaian tujuan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakekatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Pendidikan dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Salah satu unsur yang penting dimiliki oleh suatu sekolah agar menjadi sekolah yang dapat mencetak anak didik yang baik adalah dari segi pembiayaan. Manajemen pembiayaan pendidikan sangat penting hubungannya dalam pelaksanaan kegiatan sekolah.

Berbagai upaya dalam mencapai tujuan pendidikan baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, tetap saja biaya pendidikan memiliki peran yang sangat penting dan menentukan.

Oleh karena itu, pendidikan tanpa didukung biaya yang memadai, proses pendidikan di sekolah tidak akan berjalan sesuai harapan.

Penerapan peraturan dan sistem manajemen pembiayaan yang baku dalam lembaga pendidikan tidak dapat disangkal lagi. Permasalahan yang terjadi di dalam lembaga terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan diantaranya sumber dana yang terbatas, pembiayaan program yang kurang jelas, tidak transparan, tidak mendukung visi, misi, dan kebijakan sebagaimana tertulis dalam rencana strategis lembaga pendidikan. Disatu sisi, lembaga pendidikan perlu dikelola dengan tata pamong yang baik sehingga menjadikan lembaga pendidikan yang bersih dari berbagai malfungsi dan malpraktik pendidikan yang merugikan pendidikan. Perkembangan dunia dalam bidang pendidikan dengan mudah dapat dikatakan bahwa masalah pembiayaan menjadi masalah yang cukup pelik untuk dipikirkan oleh para pengelola pendidikan. Masalah pembiayaan pendidikan akan menyangkut masalah tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana prasarana, pemasaran dan aspek lain yang terkait dengan masalah keuangan. Fungsi pembiayaan tidak mungkin dipisahkan dari fungsi lainnya dalam pengelolaan sekolah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembiayaan menjadi masalah sentral dalam pengelolaan kegiatan pendidikan. Ketidakmampuan suatu lembaga untuk menyediakan biaya, akan menghambat proses belajar mengajar.

Hambatan pada proses belajar mengajar dengan sendirinya menghilangkan kepercayaan masyarakat pada suatu lembaga. Namun, bukan berarti bahwa apabila tersedia biaya yang berlebihan akan menjamin bahwa pengelolaan sekolah akan lebih baik. Pada tingkat sekolah (satuan pendidikan), pembiayaan pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan masyarakat. Sejauh tercatat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), sebagian besar biaya pendidikan di tingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan pada sekolah swasta berasal dari para siswa atau yayasan. Partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 8, yang disebutkan bahwa "masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan" serta pasal 9 yang

berbunyi “masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”.

Tingginya biaya pendidikan yang ditanggung orangtua disebabkan banyaknya komponen biaya pendidikan yang menjadi beban orangtua, seperti biaya transportasi bagi siswa, biaya pembelian seragam, pembayaran SPP, dan lainnya. Alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah lebih banyak dialokasikan untuk komponen biaya penunjang, yang menyangkut penyediaan sarana dan prasarana, seperti gaji guru, pengembangan fisik sekolah, serta pengadaan buku pelajaran. Pengelolaan pembiayaan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Adanya keragaman ini bergantung kepada besar kecilnya tiap sekolah, letak sekolah dan julukan sekolah. Pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, manajemen pembiayaan pendidikan pun masih sederhana. Sedangkan, pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya besar, tentu saja manajemen pembiayaan cenderung lebih rumit. Kecenderungan ini dilakukan karena sekolah harus mampu menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak dituntut oleh masyarakatnya.

Berdasarkan fakta di lapangan yang dilakukan mengungkapkan bahwa sekolah tidak terlepas dari manajemen pembiayaan karena dibutuhkan untuk operasional sekolah mulai dari penggajian tenaga pendidik, TU sampai menambah/memperbaiki fasilitas sekolah guna meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah itu sendiri, dan untuk, membiayai kebutuhan sekolah yang lain. Pihak sekolah mengakui bahwa untuk menjalankan itu semua para orang tua diharapkan dapat berpartisipasi dalam melaksanakan tujuan sekolah yang dalam hal ini adalah masalah pembiayaan.

Terlebih di sekolah swasta, meskipun sudah mendapat dana BOS namun untuk menunjang operasional yang lain orang tua tetap memberikan dana tiap bulannya (SPP). Menurut Wijaya dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan” menjelaskan bahwa meskipun pemerintah telah memenuhi amanat konstitusi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang alokasi APBN maupun APBD sebesar 20% untuk sektor pendidikan,

tetapi dalam prakteknya sekolah swasta hanya mendapatkan porsi anggaran yang jauh lebih kecil daripada sekolah negeri. Selain itu, mekanisme penyaluran dana BOS bagi sekolah swasta dan sekolah negeri sangat berbeda. Di SMP Negeri 2 Kota Lubuklinggau contohnya, sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah yang besar dan maju di Kota Lubuklinggau. Disekolah ini kegiatan Ektrakurikuler dan Mutu Pendidikan didalam maupun luar sekolah dapat berjalan dengan baik dengan prestasi-prestasi yang membanggakan, pemberian reward pada siswa yang berprestasi dalam bidang akademik maupun nonakademik dalam berbagai kategori di akhir tahun pelajaran, pemberian reward pada guru dan karyawan yang berprestasi, dan lain sebagainya. Untuk mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan sekolah tersebut tentunya membutuhkan biaya yang memadai yang besarnya lebih besar dari sekolah menengah pertama lainnya. Dan pembiayaan pada sekolah SMP Negeri 2 ini tidak semuanya kebutuhan dapat terpenuhi baik dalam ketersediaan bahan-bahan pelajaran dan kegiatan Penunjang lainnya. Selain masalah pembiayaan diatas tidak hanya besarnya dana yg diberikan ketepatan dalam mengalokasikan dana-dana tersebut apakah sudah tepat guna.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih tentang manajemen pembiayaan pendidikan sekolah di SMP Negeri 2 Kota Lubuklinggau. Sehingga dalam hal ini, penulis menulis artikel “*Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMP Negeri 2 Kota Lubuklinggau*”

Berdasarkan uraian tersebut diatas tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan bagaimana Perencanaan Pembiayaan Pendidikan di SMP Negeri 2 Kota Lubuklinggau; (2) Untuk Mendeskripsikan Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan di SMP Negeri 2 Kota Lubuklinggau; (3) Untuk Mendeskripsikan Monitoring Evaluasi Pembiayaan Pendidikan di SMP Negeri 2 Kota Lubuklinggau; (4) Untuk Mendeskripsikan Hambatan dan Dukungan Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMP Negeri 2 Kota Lubuklinggau.

METODE

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang mengacu pada penjelasan tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Dengan memfokuskan penelitian ini, penulis akan menggunakan metodologi

penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi 3 jenis yaitu, manusia, suasana yang diamati, dan dokumen-dokumen. Subyek dalam penelitian ini sebagai sumber data dan sumber data manusia adalah orang atau sumber yang dapat memberikan informasi tentang Manajemen Pembiayaan Sekolah. Informan penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, guru dan staf tata usaha. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 3 cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, melakukan analisis data melalui teknik deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam kaitannya dengan proses penyusunan anggaran, dalam buku Manajemen pendidikan, Lipham mengungkapkan 4 fase kegiatan pokok: merencanakan anggaran, mempersiapkan anggaran, mengelola pelaksanaan anggaran, dan menilai pelaksanaan anggaran. RAPBS perlu memperhatikan asas anggaran, yaitu: (1) asas kecermatan; (2) asas terperinci; (3) asas keseluruhan; (4) asas keterbukaan; (5) asas periodik; (6) asas pembenaan. Masalah-masalah terkait dengan penyusunan RAPBS. Salah satu implikasi dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undangan sistem pendidikan adalah diharuskannya pimpinan sekolah (terutama kepala sekolah) untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar dalam proses pengembangan RAPBS. Oleh karena itu, pimpinan itu disarankan menyadari berbagai masalah yang harus mereka hadapi untuk melaksanakan tanggung jawab yang besar itu.

Penyusunan anggaran dan pendapatan rencana kegiatan atau program yang telah disusun dan kemudian diperhitungkan beberapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, berdasarkan dari dana yang tersedia dan melaksanakan kegiatan tersebut, bukan berdasarkan dari dana yang tersedia dan bagaimana dan tersebut dihabiskan. Penyusunan rencana anggaran pendapatan (RAP) dan rencana anggaran belanja (RAB), biasanya dikembangkan dalam format-format yang meliputi: (1) sumber pembiayaan; (2) pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar,

pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, bahan-bahan dan alat pelajaran, Honorarium dan kesejahteraan.

Perencanaan keuangan sekolah disesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) Nomor 056/U/2001 menyatakan penyelenggaraan pendidikan disekolah meliputi: (1) Pelayanan yang bersifat teknis edukatif untuk proses belajar mengajar baik teori maupun praktek untuk seluruh mata pelajaran dan penilaian hasil belajar; (2) Pelayanan yang bersifat menunjang untuk operasional ruang belajar dan kegiatan ekstrakurikuler; (3) Pengadaan dan perawatan buku pelajaran, peralatan pendidikan, alat pelajaran, peralatan laboratorium dan keterampilan; (4) Pengadaan dan perawatan sarana kegiatan penunjang seperti saran administrasi, gedung sekolah, ruang kelas, fasilitas sekolah, dan lingkungan; (5) Penyediaan daya dan jasa seperti listrik, telepon, gas, dan air; (6) Perjalanan dinas kepala sekolah; (7) Pelayanan masyarakat, pemberdayaan komite sekolah, kegiatan sosial; (8) Penyelenggaraan lomba yang diikuti siswa atau guru; (9) Pelayanan habis pakai untuk keperluan sekolah seperti surat kabar; (10) Penyediaan gaji guru dan non-guru, tunjangan, honorium, lembur, transportasi, insentif dan lainnya yang menunjang kegiatan. Berdasarkan komponen penyelenggara pendidikan tersebut, tiap sekolah menentukan program prioritas yang perlu dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Monitoring adalah upaya pengumpulan informasi secara berkelanjutan yang ditujukan untuk memberikan informasi kepada pengelola program guna kepentingan tentang indikasi awal kemajuan dan kekurangan pelaksanaan program.

Evaluasi adalah Kegiatan yang terjadwal untuk menilai secara objektif kinerja atau kesuksesan program yang sedang berjalan atau telah selesai, khususnya untuk menjawab pertanyaan tentang seberapa jauh kontribusi kegiatan program terhadap pencapaian hasil/dampak yang telah ditetapkan.

Monitoring Evaluasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk mengetahui dan menganalisa kekuatan dan kelemahan dari tiap-tiap kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan guna memberikan pelayanan dan kualitas yang terbaik bagi konsumen dalam hal ini siswa dan wali murid yang bersangkutan. Kegiatan

pengawasan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan maksud untuk mengetahui: (1) kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku; (2) kesesuaian yang dicapai baik bidang terkait, administratif maupun operasional dengan peraturan yang ditetapkan; (3) kemanfaatan sarana yang ada (manusia, biaya, perlengkapan dan organisasi) secara efektif dan efisien; (4) sistem yang lain ada perubahan sistem guna mencapai hasil yang telah sempurna.

Berdasarkan sifatnya, kegiatan monitoring dapat dibedakan menjadi monitoring internal dan monitoring eksternal. Monitoring internal adalah monitoring yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota. Monitoring internal ini bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program BOS. Monitoring lebih bersifat evaluasi eksternal terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program. Monitoring eksternal ini dapat dilakukan oleh Balitbang atau lembaga independen lainnya yang kompeten.

Komponen utama yang akan dimonitor adalah: alokasi dana sekolah, penerima bantuan, penyaluran dan penggunaan dana, pelayanan dan penanganan pengaduan, dan administrasi keuangan. Pengawasan keuangan memiliki fungsi mengawasi perencanaan keuangan dan pelaksanaan penggunaan keuangan, sudah sesuai dengan juknis atau belum sehingga untuk melakukan pengawasan yang tepat, kepala sekolah diuntut untuk memahami pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksanaan administrasi keuangan, memahami peraturan pemerintah yang mengatur penggunaan dan pertanggung jawaban serta pengadministrasian keuangan.

Hambatan yang sering terjadi adalah sering keterlambatan dana masuk (cair) sehingga untuk proses pembelajaran siswa, ekstra kulikuler dan kegiatan lainnya menjadi terhambat. Proses pencairan dana yang sering terlambat membuat sekolah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan sesegera mungkin untuk digunakan siswa. Selain itu belum adanya kewenangan sepenuhnya yang diberikan bendahara sekolah dalam mengelola dana pendidikan menyebabkan sekolah perlu menunggu dana cair kemudian baru digunakan

untuk pihak sekolah. Selain itu juga dana yang digunakan harus berdasarkan juklak bukan kebutuhan sekolah sebenarnya sehingga dana BOS cenderung terbatas untuk dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan siswa.

Pembahasan

Pengawasan keuangan di sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dan instansi vertikal di atasnya, serta aparat pemeriksaan keuangan pemerintah, pembiayaan sekolah yang bersumber dari pemerintah, seperti dana BOS diawasi oleh Dinas Pendidikan kota Lubuklinggau. Tujuan pengawasan keuangan ini adalah untuk menjaga dan mendorong agar; (a) pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah didiskusikan; (b) pelaksanaan sesuai dengan peraturan instruksi serta atas asas-asas yang telah ditentukan; (c) kesulitan dan kelemahan bekerja dapat dicegah dan ditanggulangi; (d) pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efisien, efektif dan tepat waktu.

Pengawasan yang dilakukan untuk melihat apakah dana tersebut sudah tepat dalam penggunaannya dan administrasi keuangannya sudah tertib atau belum dan apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, ciri-ciri pengawasan yang baik adalah; (a) menemukan fakta pelaksanaan tugas; (b) mencegah penyimpangan dan penyeleweng susunan rencana; (c) diarahkan pada masa sekarang; (d) meningkatkan efisiensi; (e) menemukan kesalahan; (f) membimbing pelaksanaan melaksanakan tugas.

Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pembiayaan di SMP Negeri 2 Kota Lubuklinggau secara internal dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, dan pengawasan juga tidak terlalu ketat, karena bendahara yang mengatur laporan ke Dinas Pendidikan, kemudian untuk pengawasan eksternal yang dilakukan oleh inspektorat dilakukan tiga kali dalam setahun, dan instansi yang berwenang. Bagian akhir dari pengelolaan BOS adalah penyusunan laporan Pelaporan keuangan BOS merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS terhadap publik. Transparansi keuangan diperlukan untuk meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah.

Dana yang bersumber dari sekolah di SMP Negeri 2 Kota Lubuklinggau, dana yang bersumber dari pemerintah yaitu dana BOS

penggunaannya kurang disampaikan atau dialokasikan kepada masyarakat karena pada umumnya masyarakat tidak mengetahui berapa penerimaan dana BOS dan untuk apa saja kegunaannya, tetapi masyarakat juga tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut itu mungkin terjadi karena masyarakat percaya bahwa penggunaan dana tersebut sudah benar.

Monitoring dan evaluasi dalam satuan pendidikan merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah instansi/sekolah. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Tujuan utama dari monitoring dalam sebuah penyelenggara pendidikan adalah untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program atau kegiatan sebagai umpan balik bagi pelaksana kegiatan tersebut, sebagai contoh pada bagian akademik dapat digunakan untuk mengawasi penggunaan dan pendistribusian buku-buku pelajaran dan sebagainya

Kegiatan pengawasan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan maksud untuk mengetahui: (1) kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku; (2) kesesuaian yang dicapai baik bidang terkait, administratif maupun operasional dengan peraturan yang ditetapkan; (3) kemanfaatan sarana yang ada (manusia, biaya, perlengkapan dan organisasi) secara efektif dan efisien; (4) sistem yang lain ada perubahan sistem guna mencapai hasil yang telah sempurna.

Keuntungan dan manfaat dana BOS adalah:

1. Kemungkinan terlaksananya program pemerintah wajar 9 tahun yang bermutu;
2. Terlaksananya program pemerataan dan perluasan akses, program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik;
3. Seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri bebas dari pungutan terhadap biaya operasi sekolah;
4. Tidak ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran yang dilakukan oleh sekolah;
5. Tidak ada tamatan SD/setara, tidak dapat melanjutkan ke SMP/setara, atau untuk kedepannya tidak ada lagi pendidikan terakhir anak Indonesia hanya tamatan SD;
6. Meningkatnya pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen sekolah;

7. Pembiayaan seluruh kegiatan di sekolah yang berhubungan dengan proses pembelajaran dan yang mendukungnya dapat terpenuhi;
8. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Kelemahan dan kerugian dana BOS

Selain manfaat dan keuntungan yang diperoleh dana BOS, terdapat kemungkinan kelemahan dan kekurangannya. Penyebab utama dari kelemahan ini dapat terjadi karena kelalaian dan kurangnya pengawasan dan tanggung jawab masing-masing pihak. Di bawah ini adalah rinciannya:

1. Pemerintah dan perencana kebijakan APBN harus “pusing” memikirkan dan menyediakan pengalokasian dana BOS yang 20% dari keseluruhan APBN;
2. Peluan baru terjadinya nasional korupsi oleh kepala sekolah dan pengurus BOS, misalnya mark-up dan biaya untuk hal-hal yang fiktif;
3. Tambah tugas ekstra bagi kepala sekolah dan guru yang ditunjuk sebagai pengurus BOS. Tapi ada “honorinya” kok, jadi tidak akan menjadi beban yang memberatkan
4. Kemungkinan munculnya profesi ganda (PNS-businesman) oknum pegawai UPTD/dinas pendidikan yang nakal. Biasanya mengatasnamakan kedinasan dalam membuat kesepakatan agar pihak sekolah order barang/jasa keperluan sekolah melalui mereka dengan harga yang terbilang tidak murah;
5. Kemungkinan prestasi belajar siswa menurun. Kok bisa?! Sebelum ada dana BOS, siswa dipunguti biaya untuk biaya operasional sekolah. Karena uang tersebut adalah hasil keringat orang tuanya maka siswa diwanti-wanti untuk belajar bersungguh-sungguh;
6. Siswa tidak merasa “memiliki” buku-buku dan penunjang pelajaran lainnya di sekolah, karena diberikan secara gratis. Ini terlihat dari cepat rusaknya barang-barang tersebut sebelum tahun pelajaran berakhir, bahkan ada yang hilang;
7. Minimnya sosialisasi secara off-line membuat masyarakat masih banyak yang bingung tentang dana BOS;
8. Meneruskan poin 7 di atas; karena masih banyak yang bingung, maka transparansi dana BOS yang diharapkan terjadi tidak akan terwujud.

Perlu ditegaskan kembali bahwa kemungkinan terjadinya kelemahan atas adanya dana BOS adalah karena kelalaian, kurangnya/lemahnya pengawasan dan tanggung jawab masing-masing pihak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan umum masalah ini menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan di SMP Negeri 2 Kota Lubuklinggau selalu mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku. Sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah, yaitu dana rutin dan dana bantuan operasional sekolah (BOS), pengalokasian, realisasi penempatan dan tanggung jawabnya berdasarkan petunjuk dan buku pedoman penggunaan BOS bukan berdasarkan kebutuhan sekolah.

Simpulan secara khusus dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan SMP Negeri 2 Lubuklinggau disusun oleh kepala sekolah dengan melibatkan bendahara, dewan guru, pengurus dan ketua komite serta wali murid mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab uang pada dasarnya merupakan pernyataan financial, memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui bersama, dengan melakukan revisi usulan anggaran, persetujuan revisi anggaran, pengesahan Anggaran yang kemudian dirangkum dalam RAPBS.
2. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 2 Kota Lubuklinggau. Pelaksanaan anggaran pendidikan meliputi: (a) melakukan analisis internal dan eksternal terhadap potensi sumber dana; (2) mengidentifikasi, mengelompokan, dan memperkirakan sumber-sumber dana yang dapat digali dan dikembangkan; (c) menetapkan sumber dana masyarakat, mengalang partisipasi masyarakat melalui komite sekolah;
3. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 2 Kota Lubuklinggau, meliputi: (a) Perencanaan anggaran dana; (b) Pelaksanaan pengelolaan dana; (c) Evaluasi penggunaan dana BOS dilakukan secara insidental dalam bentuk pengawasan melekat oleh kepala sekolah dan monitoring internal dilakukan oleh tim manajemen BOS Kota Lubuklinggau, dan Pelaporan

BOS di SMP Negeri 2 Kota Lubuklinggau dilaksanakan secara per bulan, triwulan, dan per tahun dengan format penyusunan laporan mengikuti petunjuk penyusunan laporan serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik terutama terhadap orang tua siswa;

4. Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 2 Kota Lubuklinggau. Kegiatan memonitor kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan pertanggung jawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang selain itu dilakukan evaluasi, untuk memperbaiki jika ada kesalahan untuk ditindaklanjuti. Secara internal, Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau belum melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pembiayaan sekolah di SMP Negeri 2 kota lubuklinggau, Dinas Pendidikan hanya melihat pembukuan dan laporan pertanggung jawaban yang dilaporkan oleh sekolah saja. Pengawasan secara eksternal oleh inspektorat dilakukan dilakukan secara periodik;
4. Hambatan dan dukungan dalam upaya pemecahan permasalahan dalam pembiayaan sekolah di SMP Negeri 2 Lubuklinggau adalah pada kesulitan dalam penyusunan RAPBS, untuk itu dilakukan upaya dengan meminta pihak Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau agar dapat melakukan realisasi dan memberikan pembinaan tentang pembuatan RAPBS kepada kepala sekolah dan bendahara secara bertahap, minimal di masing-masing kecamatan. Sedangkan untuk dana yang terbatas di upayakan kreativitas kepala sekolah untuk menggali dana dari berbagai sumber, salah satunya dengan melakukan kegiatan mendirikan sekolah yang bisa menghasilkan pendapatan sekolah.

Saran

1. Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau atau pihak terkait diharapkan dapat memberikan bimbingan dan pelatihan dalam penyusunan dan pembuatan RAPBS;
2. Perlu Adanya Usaha Dan Kreativitas Dalam Mengatasi Kekurangan Dana Sekolah;
3. Realisasi pemanfaatan dana harus di sesuaikan dengan kebutuhan sekolah, sehingga program bantuan operasional

sekolah benar-benar dapat memenuhi kebutuhan sekolah serta meningkatkan mutu dan tujuan sekolah;

4. Sekolah harus terbuka atau transparan dalam pengelolaan keuangan sekolah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dinas pendidikan Kota Lubuklinggau diharapkan melakukan pengawasan terhadap pembiayaan pendidikan secara intensif dan kontinyu untuk mengetahui ketetapan penggunaan anggaran dan akuntabilitasnya;
6. Kendala yang timbul hendaknya segera secepat mungkin, dengan melibatkan berbagai unsur yang terkait sesuai pedoman atau petunjuk teknis yang ada.

DAFTAR RUJUKAN

- Gitosudarmo, Indriyo dan Mulyono, Agus. 1999. *Prinsip Dasar Manajemen (Edisi 3)* Yogyakarta : BPF
- Nawawi. H. (2001). *Administrasi Pendidikan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Robbin, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi*. (Alih Bahasa : Benyamin Molan). Klaten: PT. Indek, Kelompok Gramedia.
- Wahjosumidjo. 2001. *Kepala sekolah : Tinjauan teoritis dan permasalahannya*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Winardi. 1993. *Manajer dan Manajemen*. Bandung: Citra Aditya Bakti